

ABSTRAK

Penelitian ini di latarbelakangi oleh adanya kewajiban untuk pemilik Hak Atas Tanah agar dapat mendaftarkan tanahnya masing-masing, dalam persoalan pendaftaran tanah ini merupakan hal yang sangat penting menurut Undang- Undang Pokok Agraria dalam hal ini pendaftaran tanah merupakan aspek penting dari prosesnya sebuah bukti dari kepemilikan hak atas tanah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah seandainya terlibat dalam tumpang tindih kepemilikan sebidang tanah tercantum dalam peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 ada beberapa diantaranya dalam Pasal 19 Ayat 2 (c), Pasal 23 Ayat 2, dan ada Pasal 32 Ayat 2, lalu ada Pasal 38 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi Surat tanda bukti hak berlaku untuk alat bukti yang sangat kuat demikian juga bagi pemilik hak atas tanah yang menjadi objek dalam konflik tidak akan mendapatkan sebuah perlindungan setelah mendapatkan keputusan mencabut sertifikat tanah yang lain atau ganda. Penelitian yang akan di gunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif berupa ketentuan-ketentuan Peraturan-peraturan undang-undang. Hasil penelitian yang dapat penulis sampaikan jika kita memiliki sertifikat tanah yang sudah di daftarkan sejak lama pada kantor BPN setempat, akan dapat di gunakan kembali sebagai alat bukti jika sewaktu-waktu terjadinya konflik pertanahan, data tersebut sudah tersimpan oleh kantor bpn setempat dan mudah untuk di akses oleh berbagai pihak.

Kata Kunci: Tumpang Tindih, Perlindungan Hukum, Peraturan Pemerintah

ABSTRACT

This research is motivated by the obligation for land rights owners to be able to register their respective lands, in the issue of land registration this is very important according to the Basic Agrarian Law in this case land registration is an important aspect of the process a proof of ownership of land rights. The purpose of this study is to determine the legal protection system for land rights holders if they are involved in overlapping ownership of a piece of land listed in government regulation No. 24 of 1997, there are several of them in Article 19 Paragraph 2 (c), Article 23 Paragraph 2, and there is Article 32 Paragraph 2, then there is Article 38 Paragraph 2 of the Basic Agrarian Law which reads Letter of proof of rights applies to very strong evidence as well as for owners Land rights that are objects in conflict will not get a protection after obtaining a decision to revoke another or double land certificate. The research that will be used in this writing is Normative Juridical in the form of provisions of statutory regulations. The results of the research that the author can convey if we have a land certificate that has been registered for a long time at the local BPN office, will be able to be reused as evidence if at any time a land conflict occurs, the data has been stored by the local BPN office and is easy to access by various parties.

Keywords: *Overlap, Legal Protection, Government Regulation*